DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Jakarta; Sinar Grafika.

Abdul Razak. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta; Penerbit Litera.

Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta; Sinar Grafika.

Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar; Identitas Universitas Hasanuddin.

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara.* Yogyakarta; Pustaka Yustisia.

A.M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan.* Jakarta Timur; Prenada Media Group.

Atin Istiarni. 2018. *Jejak Pena Pustakawan*. Yogyakarta; Azyan Mitra Media.

Bambang Pujo Purwoko. 2021. *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku 11 Bentuk-Bentuk Perusahaan.* Serang; CV. Amal Saleh.

Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara.* Bogor; Ghalia Indonesia.

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.* Yogyakarta; Mirra Buana Media.

Kurhayadi, Yeti Rohayati dan Bambang Sucipto. 2020. *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi.* Solok; CV. Insan Cendekia Mandiri.

Lutfi Efendi. 2014. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang; Bayumedia Sakti Group.

Marbun dan Mahfud. 2017. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta; Liberty.

aufiqurrahman. 2022. *Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*. alang; CV Literasi Nusantara Abadi.

s M.Hadjon. 2013. *Pengantar Hukum Perizinan.* Surabaya; Yuridika.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Philipus M. Hadjon. et.al. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta; Gadjah Mada Press University.

Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok; PT. Raja Grafindo Persada.

S. Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta; Ghalia Indonesia.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik).* Depok; Rajawali Pers.

Tambunan, Toman Sony, Wilson R.G Tambunan, 2022. *Hukum Bisnis*. Jakarta; Kencana.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta; Prenada Media.

Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Buku Ajar Hukum Perijinan.* Cetakan Pertama. Surabaya; UBHARA Press.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan,* Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana.

Skripsi:

Andi Al-Amri Yahya, 2020, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Café Di Kota Makassar*, Skripsi, Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Muh. Fadil Prawira N. Sajuti. 2021. *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Diskotik di Kota Makassar.* Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Prasetio Rizki Sadhewa. 2022. *Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi Di Polsek Air Batu Kisaran.* Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Optimized using trial version www.balesio.com

ti, Mai Puspadyna, “Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan elayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo ngan SIJITU (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)”, Reformasi: Jumal

Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Diponegoro, Vol.9 Nomor 1 2019, hlm. 85. Diakses pada 13 Maret 2023.

Juvisher Vigoh Rivaldo, et.al, "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Unsrat Lex Et Societatis, Vol. 8 Nomor 4, Oktober 2020, hlm. 231. Diakses pada 21 September 2023.

Nur Asiyah, "Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12 Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 126.

Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 Nomor 4 Tahun 2009, hlm 604. Diakses pada 29 Mei 2023. Diakses pada 22 September 2023.

Zulkifli Aspan, et.al, "Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara", Al-Azhar Islamic Law Review. Universitas Hasanuddin, Vol. 1 Nomor 1, Januari 2019, hlm 13. Diakses pada 3 Agustus 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe.

ın Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 ıtang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

ın Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan erizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Intensif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Berusaha.
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Wawancara:

Wawancara dengan Drs. La Bengnga, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, pada Tanggal 16 Februari 2023.
Wawancara dengan Usman Demma, Kepala Satpol PP Kab. Sidrap, pada Tanggal 16 Februari 2023.
Wawancara dengan Saharuddin S.H., M.AP., Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap, pada Tanggal 18 September 2023.
Wawancara dengan Ir. Hj. Nur Asia, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPTSP Kab. Sidrap, pada Tanggal 25 September 2023.
Wawancara dengan Kaharuddin Djohan, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Kab. Sidrap, pada Tanggal 2 Oktober 2023.
Wawancara dengan Iking (pelaku usaha kafe), pada tanggal 25 September 2023.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Wawancara dengan salah satu pelaku usaha kafe yang beroperasi sebagai tempat hiburan malam, pada tanggal 4 oktober 2023.
Wawancara dengan salah satu pelaku usaha kafe yang menyalahi izin, pada tanggal 7 oktober 2023.
Wawancara dengan salah satu pelaku usaha kafe yang menyalahi izin (2), pada tanggal 6 oktober 2023.

Website:

https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=16. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 DINAS PM-PTSP Kab. Sidenreng Rappang. Diakses Pada tanggal 17 Juli 2023.
http://sidrapkab.go.id/site/file/dokumen/LKJIP_DPMPTSP_TAHUN_300522.pdf. Diakses Pada tanggal 17 Juli 2023.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO.5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) – 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 / 505 / DPMPTSP / X / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	**: SALSABILA**
NIM	**: B021191084**
Program Studi	**: Hukum Administrasi Negara**
Pekerjaan	**: Mahasiswa (S1) UNHAS**
Alamat	**: JL. A. PANNYIWI, KEL. RIJANG PITTU, KEC. MARITENGNGAE**

Telah melaksanakan penelitian pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu judul yang telah ditetapkan terhitung sejak tanggal **14 September 2023 s/d 14 Oktober 2023**, dengan judul :

"PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAGUNAAN IZIN USAHA KAFE DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikam kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 05 Oktober 2023

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 126

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No.12 Kel. Batu Lappa
SULAWESI SELATAN 91611

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 150 /X/Satpol PP-Damkar/2023

Yang bertanda tangna di bawah ini :

Nama : USMAN DEMMA, S.Sos

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran

Nip : 19651231 198611 1 045

Pangkat : Pembina TK I, IV/b

Menerangkan bahwa :

Nama : SALSABILA

Nama Pokok Mahasiswa : B021191084

Jurusan : Hukum Administrasi Negara

Untuk tersebut diatas benar-benar Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar yang melaksanakan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 14 September s/d 14 Oktober 2023, dengan judul penelitian " PELAKSANAAN PENGAWSAN TERHADAP PENYALAGUNAAN IZIN USAHA KAFE DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pangkajene Sidenreng, 5 Oktober 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

USMAN DEMMA, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Tk. I, IV/b
NIP. 19651231 198611

Optimized using trial version www.balesio.com